

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ketika bangsa Indonesia menapaki tangga reformasi dengan dilaksanakannya Pemilu 1999 euforia politik ditunjukkan dengan adanya partai-partai politik yang banyak bermunculan. Masa transisi ini melahirkan situasi yang serba kacau, sehingga sekarang bangsa Indonesia masih jauh dari pelaksanaan nilai-nilai demokratis begitu sulitnya karena Indonesia tengah dilanda bermacam-macam masalah, meliputi krisis politik dan ekonomi secara bersamaan.

Di era reformasi seperti sekarang ini banyak orang yang menuntut perubahan. Kehadiran partai-partai politik baru hingga pedesaan merupakan salah satu bentuk perubahan yang terjadi. Dalam negara berkembang partai politik dapat membina kesatuan dan persatuan bangsa. Persoalan-persoalan yang dihadapi dari negara ini cukup kompleks, maka partai politik dituntut lebih berperan aktif dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana harapan kita adalah terletak pada partai politik untuk melaksanakan fungsi kontrol dan mengadakan perubahan yang lebih baik demi terwujudnya cita-cita negara, tetapi harapan itu belum diandalkan sekarang ini.

Tampak kepemimpinan sudah beberap kali berganti, tetapi kondisi bangsa ini tidak kunjung pulih bahkan semakin terpuruk. Bangsa ini benar-benar membutuhkan sebuah perubahan yang mendesak dan nyata dari para pemegang kekuasaan, untuk selalu konsisten dan konsisten memperjuangkan nasib bangsa ini yang ternyata belum terbukti hingga sekarang.

Dalam kondisi ini partisipasi rakyat dalam urusan pemerintahan diwakili oleh sejumlah orang dari kalangannya sendiri untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan mereka.

mengorganisir kepentingan masyarakat dan kemudian organisasi tersebut memilih sejumlah orang untuk menduduki jabatan-jabatan dalam organisasi (negara).

Proses depolitisasi yang telah berjalan secara sistematis di Indonesia selama kurang lebih tiga dasawarsa terhadap kehidupan partai politik bangsa oleh rezim Orde Baru dengan Golongan Karya sebagai partainya telah menjadi keharusan demokrasi dan kedaulatan rakyat seutuhnya. Rekayasa politik melalui kebijakan floating mass sebagai pendukung pelaksanaannya melalui UU NO. 3 Tahun 1975 yang memberikan kekuatan dominan sebagai kekuatan oligarkisme kekuasaan karena peranan penguasa yang sangat kuat mampu mengontrol pergerakan dan tindakan partai lain (PPP, PDI) termasuk didalamnya proses rekrutment elite serta kaderisasi politiki.¹ Sehingga partai politik tidak mampu mencetak kader-kader progresif sebagai agen pembaharu melainkan elite-elite konserfatif yang tunduk terhadap kebijaksanaan penguasa.

Runtuhnya rezim Orde Baru (1998) merupakan cikal-bakal perubahan kultur politik bangsa dari oligarkisme politik menjadi liberalisasi dengan sistem multipartai. Harapan akan penampilan tokoh-tokoh baru dalam gelanggang politik merupakan upaya untuk kesinambungan kekuasaan dan memperluas partisipasi masyarakat Tetapi realitas memberikan bukti yang kontraproduktif. Inkonsistensi moral dan kepribadian kepemimpinan meluas keseluruh elite-elite politik. Penjamuran partai politik tidak lebih dari euforia belaka dan konflik elite menjadi kekhawatiran rakyat dibalik krisis yang melanda bangsa ini.

Kemuliaan fungsi elite politik diatas tentunya tidaklah mudah, tetapi memerlukan kaderisasi pada rekrutmentnya. Rekrutment elite sebagai sesuatu indikator kekuatan politik sangat berguna untuk memberi penjelasan terhadap perubahan-perubahan tingkat perpolitikan

serta jenis dan tingkat partisipasi rakyat, tentunya tidaklah mudah merefleksikan rasa nasionalisme, tetapi harus melalui proses-proses visi dan misi dalam organisasi serta menciptakan Sense of belonging terhadap organisasi partainya sebagai media perjuangan. Tetapi realitas tidak bisa berbohong keberadaan para elite politik kita, yang jauh dari harapan sehingga sangat berpengaruh sekali terhadap kaderisasi dalam menjaring dan membentuk kader-kader partainya, yang itu nampak dari kualitas kader yang dihasilkan yang ternyata jauh dari harapan idealnya sebuah partai politik.

Percepatan pemilu 1999, memberikan waktu yang singkat bagi partai-partai politik untuk melakukan kaderisasi. Kurang kuatnya kaderisasi elite partai partai tersebut dapat dilihat dari munculnya konflik-konflik elite internal partai politik, seperti yang dikatakan oleh Haedar Nasir bahwa elite-elite baru yang menonjol akan mempengaruhi sistem, karena akan muncul konflik-konflik antara elite itu sendiri. Masing-masing membawa jargon-jargonnya sendiri sehingga tidak mudah menciptakan integritas elite. Hasilnya adalah perpecahan partai-partai yang telah terjadi beberapa partai di Indonesia.² Pada pemilu 2004 membawa harapan baru bagi bangsa indonesia untuk melakukan perubahan, yang dikatakan paling demokratis dari perjalanan bangsa ini, dengan sistem pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung. Kondisi politik menjelang pemilu 2004 cukup keruh dan memanas akibat peran pernyataan antara elite politik dan tokoh partai yang senantiasa menghiasi hedline berbagai media massa. Selain peran pernyataan politik, kondisi politik sendiri menjelang pemilu 2004 diwarnai dengan peristiwa-peristiwa penting yang pada ujungnya bermotif konflik politik. Kekecewaan masyarakat terhadap kiprah partai politik, pemerintah dan komisi pemilihan umum (KPU) dalam menyiapkan pemilu 2004 ternyata tidak sepenuhnya menjadi indikator bagi menurunnya pemilih pada pemilu 2004. sebagian besar publik memang mengaku tidak puas atas berbagai kinerja

² Kedaulatan Rakyat, 15 Juni 2005

parpol dalam menjalankan berbagai fungsinya selama ini. Kinerja partai dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, rata-rata tidak memuaskan.³

Pemilu 2009 ini nampaknya menjadi arena politik yang kurang menguntungkan bagi parpol yang pernah berkuasa diparlemen seperti halnya PDI-P, Golkar, PAN, PPP yang secara umum mengalami penurunan dalam perolehan suara, yang menandakan bahwa partai-partai politik lama harus bersaing dengan partai-partai politik baru yang telah mendapat simpati di hati rakyat, yang dibuktikan dalam perolehan suara dalam pemilu legislatif seperti halnya pada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat (PD). Kemudian disusul oleh kehadiran Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Untuk pemilu legislatif pada tahun 2004 di daerah Istimewa Yogyakarta partai golkar memperoleh suara mayoritas. Sedangkan pada pemilu legislatif pada tahun 2009 partai golkar mengalami penurunan perolehan suara yang sangat signifikan. Menurut data dari kantor DPD I Partai Golkar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah perolehan suara partai golkar pada pemilu legislatif 2004 dan 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah perolehan suara partai golkar pada pemilu Legislatif 2004 & 2009
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Nama Daerah Pemilihan	Pemilu 2004	Pemilu 2009
1	Kota Yogyakarta	23. 804	15. 800
2	Kabupaten Bantul	22. 978	41. 126
3	Kabupaten Kulonprogo	34. 091	24. 743
4	Kabupaten Sleman	50. 610	49. 784
5	Kabupaten Gunung Kidul	99. 663	49.255
Jumlah Perolehan Suara		231. 146	180. 708

Sumber : Kantor DPD I Partai Golkar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2009

Ada beberapa hal yang menyebabkan penurunan perolehan suara partai Golkar pada pemilu legislatif tahun 2009 di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

1. Munculnya berbagai partai politik baru yang dibentuk oleh sebagian besar dulunya merupakan kader-kader partai golkar seperti halnya Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo dan partai Hanura yang dipimpin oleh Wiranto. Kemunculan partai tersebut memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi partai golkar seperti halnya yang terjadi di DPD I Partai Golkar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana kader-kader partai golkar direkrut oleh partai Gerindra dan partai Hanura dan menempatkan mereka pada posisi yang strategis dalam kepengurusan partainya.
2. Adanya permasalahan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) yang mengakibatkan sebagian kader maupun simpatisan partai golkar tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2009.⁴

Fenomena ini cukup membuktikan lemahnya kaderisasi yang dilakukan partai politik. Kaderisasi yang mampu menghasilkan kualitas kader yang memiliki kemampuan membawahi nilai-nilai perjuangan yang berkesinambungan yang mengembangkan komitmen yang jelas dan terarah terhadap personal partai politik mengenai visi, misi perjuangan parpol yang pada akhirnya menciptakan ikatan emosional yang integrated serta memiliki rasa nasionalisme dengan mengedepankan nilai-nilai kepentingan nasional.

Kaderisasi dipengaruhi oleh tradisi partai dan lingkungan sistem politiknya. Tidak semua partai menjadikan keanggotaan sebagai satu-satunya jalan masuk menuju jenjang karier politik yang terhormat, bahwa setiap sistem politik (parpol) terdapat prosedur-prosedur untuk melaksanakan rekrutment atau penyeleksian yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dimana kaderisasi adalah suatu proses membentuk dan mempersiapkan tenaga-tenaga potensial,

militan, terdidik, terlatih untuk mengarahkan dan menggerakkan berbagai kekuatan atau sumber daya serta mampu memimpin dan melaksanakan tugas-tugas pencapaian misi organisasi secara optimal dimanapun berada dengan penuh dedikasi, semangat dan tanggap terhadap situasi yang ada.

Dalam konteks pengkaderan, Partai Golkar mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk mendapatkan kader yang tangguh maka diperlukan suatu pembinaan yang secara khusus dengan cara bertahap. Adapun pentahapan tersebut yaitu dengan membangun kekuatan pribadi, sebab pribadi yang baik dapat melahirkan keluarga yang baik, keluarga yang baik dapat pula melahirkan masyarakat yang baik. Mengingat pembangunan sebuah negara memerlukan pribadi dan masyarakat yang shalih, yang layak memikul amanah yang dibebankan kepadanya, maka individu bertanggung jawab karena ia adalah alat masyarakat dan negara yang terpenting dalam melaksanakan tugas sosial dan politik demi kepentingan dan tujuan bersama.

Dalam Partai Golkar, kaderisasi menjadi aktifitas utama partai, untuk itu partai Golkar juga sering disebut sebagai partai Kader, tentunya tidak begitu menekankan pada jumlah massa yang besar tetapi lebih menekankan pada disiplin anggota-anggotanya dan ketaatan dalam organisasi. Sehingga kekuatan partai kader sesungguhnya bersumber bukan dari kuantitas melainkan kualitas anggotanya.

Hal inilah yang mendorong penyusun untuk mengetahui dan meneliti lebih jauh tentang kaderisasi yang dilakukan Partai Golongan Karya, dimana kaderisasi dalam Golkar telah mampu

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

” Bagaimana Kaderisasi dalam Partai Golongan Karya dalam menyongsong pemilu 2009 di Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta”?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui kaderisasi yang dilakukan oleh partai golongan karya dalam menyongsong pemilu 2009 di DPD I Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. KERANGKA TEORI

1. Sistem Kepartaian

Sistem kepartaian dan partai politik merupakan 2 konsep yang berbeda. Sistem kepartaian menunjukkan format keberadaan antar partai politik berbeda-beda disetiap negara atau di satu negara pun berbeda-beda dilihat dari aspek sejarahnya. Sistem politik yang dikenal hingga kini adalah Demokrasi Liberal, Kediktatoran militer, Komunis, dan Otoritarian Kontemporer.

Sistem kepartaian adalah pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak disetiap proses pemilu tiap negara. Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat

perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik.⁵

Ada beberapa cara yang digunakan untuk membahas sistem kepartaian. Cara-cara tersebut menurut Daniel Dakidae adalah : "Pertama, melihat partai sebagai unit-unit. Cara ini melihat partai sebagai kesatuan yang terlepas dari kesatuan yang lain. Kedua, dengan melihat interaksi antara partai dalam suatu medan kompetisi antara satu dengan yang lainnya."⁶

Sistem kepartaian di Indonesia, sebagai suatu negara yang demokratis dan sedang memperjuangkan nilai-nilai dan sedang memperjuangkan pembangunan ekonomi, harus mengandung nilai-nilai tertentu, oleh karena itu sistem kepartaian yang sebaik-baiknya adalah yang dapat mengkombinasikan secara optimal dua nilai, yaitu jaminan serta penghargaan terhadap hak-hak rakyat untuk turut serta didalam proses pembuatan keputusan pada tingkat kenegaraan dengan jalan memilih wakil-wakilnya secara bebas dan rahasia dan tercapainya tingkat stabilitas nasional (politik) sebagai syarat mutlak bagi aktifitas birokratik power untuk mencapai tujuan negara.

Disamping itu hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepartaian di Indonesia adalah mengenai bentuk dan luasnya organisasi partai serta kegiatan, sebagian tergantung pada Undang-undang dasar negara. Suatu hak pilih yang meluas membutuhkan suatu organisasi yang lebih intensif daripada suatu hak pilih yang terbatas semakin besar jumlahnya pejabat yang dipilih semakin bertambah pula prosedur pencalonan dan tata cara kampanye.

Sistem partai politik dapat digolongkan menjadi tiga macam, Yaitu :

1. Sistem Partai tunggal (one party system)

Sistem partai tunggal baik negara yang gbenar-benar hanya mempunyai suatu partai disamping itu juga negara dimana ada satu partai yang dominant. Dalam negara dengan partai tunggal, keadaan kepartaian dalam negara tersebut dinamakan tidak bersaing atau non kompetitif, disebabkan karena partai-partai yang lain dalam negara harus menerima pimpinan dari partai yang dominant serta tidak dibenarkan untuk bersaing secara bebas dan terbuka. Partai politik yang ada disuatu negara yang menganut sistem satu partai mungkin benar-benar merupakan satu-satunya partai politik yang ada di negara tersebut.

Dengan demikian tidak mengherankan apabila muncul pendapat seperti apa yang dikemukakan oleh Miriam Budiarjo yang mengatakan istilah partai tunggal dipakai untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan yang dominant diantara beberapa partai lainnya.⁷

Pada umumnya sistem partai dianut oleh negara-negara yang baru merdeka, tetapi disamping itu sistem satu partai juga dianut di negara yang bersifat diktator atau negara-negara komunis.

Selanjutnya Miriam Budiarjo mengatakan kecenderungan sistem satu partai dianut oleh kebanyakan negara-negara yang baru merdeka disebabkan oleh karena di Negara-negara pemimpin sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan daerah serta suku bangsa yang berbeda corak

Dengan seringnya para pemimpin dengan permasalahan seperti itu, pada umumnya diambil langkah dengan dianutnya sistem satu partai diharapkan pengintegrasian berbagai golongan, daerah serta suku bangsa yang berbeda-beda corak social dan pandangan hidupnya dapat segera dilaksanakan.

Di Afrika umumnya di negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan cenderung untuk mendirikan partai tunggal dengan harapan bahwa satu partai pemerintahan yang kuat pada masa pembangunan dapat bertindak sebagai penggerak pembangunan.

Dalam negara yang menganut sistem satu partai kekuatan sentral dalam negara tidak pernah bergeser, dalam konteks pemilihan umum, sistem ini menggunakan satu daftar calon yang resmi dan tidak memberikan pilihan yang bebas bagi para warganya.

Dalam negara yang menganut sistem ini stabilitas pemerintahan lebih terjamin, Karena pemerintah melalui partai politik menghimpun semua kekuatan dalam satu wadah sehingga kemungkinan terjadinya pertentangan antar golongan mudah diatasi. Disamping itu tindakan kebebasan oleh pemerintah didalam mencapai tujuan diperbolehkan. negara melauai partai politik dapat memaksakan kehendaknya pada masyarakat untuk mrngatasi krisis politik atau untuk mempertahankan kekuasaan.

Negara yang menganut sistem satu partai ideologi politik yang dianut oleh partai politik dijadikan ideologi negara, jadi ideologi partai politik identik dengan ideologi negara.⁹

Sistem monopartai dalam negara yang bersifat fasis, partai politik berfungsi sebagai pemeliharaan keamanan sehingga partai politik berfungsi sebagai pembela dan

⁹ S. Tete Pandaya, 1998, *Sistem Politik Dan Perkembangan Kebijakan Demokrasi Yogyakarta*, Liberty, hal.22

penerus revolusi. Dalam hal ini komunis sebagai alat untuk meyakinkan dan mengajarkan untuk mendorong aktifitas masyarakat disegala kehidupan kolektif.

Dalam negara komunis yang menjadi penguasa adalah pemimpin partai, sehingga setiap keputusan negara sebenarnya merupakan keputusan partai. Kebebasan sama sekali ditiadakan, karena negara mencampuri semua aspek kehidupan masyarakat, dengan demikian rakyat dipaksa mengikuti pola berfikir partai, hal ini mengakibatkan individu tidak dapat mengembangkan dirinya.

2. Sistem Dua Partai (Two Party System)

Di negara tersebut dua partai atau mempunyai lebih dari dua partai, akan tetapi yang memegang peranan dominant yaitu dua partai. Dalam sistem dua partai, maka dapat dibagi menjadi dua partai yaitu partai yang besar, berkuasa, karena memang dalam pemilihan umum, partai mayoritas, partai ini memang tanggung jawab untuk urusan-urusan umum. Sedangkan lainnya dinamakan partai minoritas atau partai oposisi karena kalah dalam pemilihan umum, partai oposisi mempunyai tugas untuk memeriksa dengan teliti dan mengkritik pemerintah.

Suatu negara dikatakan menganut sistem dua partai bila didalam wilayah negara tersebut diperbolehkan hidup dua partai politik yang sudah diatur dalam konstitusinya atau perundang-undangannya. Akan tetapi disamping kedua partai politik tersebut, ada kemungkinan besar masih terdapat beberapa partai politik lainnya yang merupakan partai politik kecil yang kurang atau bahkan tidak memainkan peranan yang dominant dalam kehidupan politik negara yang bersangkutan.

Ciri dari sistem ini adalah terbaginya partai-partai yang berkuasa dan partai oposisi. Ciri demokratis ini menyebabkan kekuasaan atau terdapatnya

pemerintahan yang senantiasa bergantian antara yang satunya dengan yang lainnya, yang tergantung pada kemampuan partai yang bersangkutan menyerap aspirasi rakyat untuk dirumuskan dalam berbagai program serta ditawarkan dalam pemilihan umum.

Sistem dwi partai biasanya diperkuat dengan sistem pemilihan berdasarkan sistem distrik, yang setiap daerah pemilihan dapat dipilih satu wakil saja. Sistem ini tidak didorong tumbuhnya partai baru sehingga dengan demikian memperkuat sistem tersebut.¹⁰ Sistem dwi partai dapat berjalan dengan baik terutama di dalam masyarakat yang komposisi masyarakatnya bersifat homogen, yaitu sedikit terdapat kesenjangan sosial. Situasi masyarakatnya sudah mampu sehingga warga masyarakat akan menyesuaikan dirinya dengan sistem dwi partai tersebut.

Dalam sistem dua partai, kedua partai politik akan saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan yang sebesar mungkin, partai politik yang satu dalam persaingan itu akan berusaha untuk mengungguli partai politik yang lainnya dalam hal mendapatkan kekuasaan.

Persaingan yang tampak sangat jelas diantara dua partai politik tersebut adalah pada saat diselenggarakannya pemilihan umum adalah merupakan salah satu sasaran untuk menentukan partai politik yang akan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar di negara yang bersangkutan.

Pada saat berlangsungnya pemilihan umum, kedua partai politik yang saling bersaing itu akan berlomba untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin. Partai politik yang memperoleh suara terbanyak akan keluar sebagai pemenang, dalam hal ini berarti partai politik tersebut ada gilirannya akan mendapatkan kekuasaan yang lebih besar apabila dibandingkan dengan kekuasaan yang didapatkan partai politik lainnya

Partai politik yang memenangkan persaingan untuk mendapat kekuasaan yang sebesar mungkin tadi dengan sendirinya akan memegang kendali roda pemerintahan di negara yang bersangkutan. Sedangkan partai politik yang mengalami kekalahan dalam persaingan tersebut akan bertindak sebagai partai politik memenangkan pemilu.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa di dalam negara yang menganut sistem dwi partai, partai-partai politik yang ada dibagi dua, yaitu partai yang berkuasa dan menjalankan pemerintahan, dan partai politik yang tidak berkuasa dan berperan melakukan oposisi terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh partai politik yang sedang berkuasa.

Di dalam sistem dua partai kestabilan pemerintahan akan baik apabila masyarakatnya bersifat homogen dan telah mampu, apabila masyarakatnya bersifat majemuk dan belum mapan akan sulit digunakan dua partai.

Menurut Peter GJ. Pulser berpendapat bahwa ada tiga syarat untuk suksesnya suatu sistem dwi partai, yaitu homogenitas sosial, konsensus nasional dan kontinuitas sejarah.¹¹

3. Sistem Multi Partai

Dalam negara tersebut ada berapa partai yang hampir sama kekuatannya. Masing-masing partai mempertahankan suatu politik tertentu tentang satu atau sejumlah persoalan-persoalan yang penting. Suatu negara dengan sistem multi partai masing-masing memiliki partai pendukung partai yang hampir sesuai dengan dan mewakili

Suatu negara dikatakan menganut sistem multi partai atau banyak partai, apabila dalam negara tersebut diperbolehkan hidup dan perkembangan banyak partai (lebih dari dua partai politik). Sistem banyak partai ini dilaksanakan di negara perancis, Belanda, Indonesia dan lain-lain.

Miriam Budiarto mengatakan: pada umumnya negara yang menganut sistem banyak partai adalah negara yang masyarakatnya bersifat mejemuk, kemajemukan masyarakat dapat ditunjukkan dengan terdapatnya bermacam-macam perbedaan sosial, seperti ras, suku, agama dan status. Dengan adanya kemajemukan masyarakat seperti itu maka golongan-golongan dalam masyarakat lebih cenderung meyeluruh loyalitas mereka ke organisasi yang sesuai dengan kelompok-kelompok yang lain yang berbeda orientasinya.¹³

Dengan adanya kemajemukan masyarakat yang ditunjukkan dengan adanya bermacam-macam perbedaan sosial sebagaimana disinggung di atas, paling tidak membawah negara yang bersangkutan untuk cenderung menganut sistem banyak partai. Dengan dianutnya sistem banyak partai maka aspirasi-aspirasi atau kepentingan yang ada dalam masyarakat yang mejemuk tadi akan lebih mudah tertampung dan tersalurkan.

Sistem multi partai umumnya didukung dengan sistem pemilihan umum yang menggunakan sistem perwakilan berimbang, karena partai-partai politik dapat menarik keuntungan dari ketentuan bahwa suara yang diperoleh disuatu daerah pemilihan dapat ditarik kedaerah pemilihan lain untuk menggenapkan jumlah yang diperlukan. Gejala umum dari sistem banyak partai ini adalah sulitnya memperoleh suara mayoritas dihadapan perwakilan, sehingga tidak setiap partai politik yang mempunyai jumlah

Partai adalah tempat sekelompok orang berkumpul yang mempunyai tujuan serta ideologi yang sama untuk mewujudkan keinginannya, partai juga disebut sebagai sebuah organisasi.

2. Partai Politik

1. a. Pengertian Partai Politik

Partai Politik sudah dikenal oleh Bangsa Indonesia lima puluh tahun sejak kita mengenal / memperoleh kemerdekaan. Didalam Ilmu Politik sudah lama mengajarkan bahwa partai politik mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menganut sistem demokrasi, terutama sebagai penghubung antara kepemimpinan rakyat dengan pemerintah. Partai politik awalnya merupakan tuntutan dan keharusan mutlak dalam kehidupan politik moderen yang demokratis. Ia eksis secara idial dalam masyarakat ditujukan untuk mengaktifkan dan memobilisasi massa, mewakili kepentingan umum memberikan jalan kompromi bagi jalan yang berbeda, serta menyediakan sarana suksesi secara sah dan damai.

Agar supaya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai partai politik. Maka kiranya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian partai politik itu sendiri.

Banyak sudah sarjana-sarjana Ilmu Politik terkenal mengemukakan pengertian partai politik, namun pengertian-pengertian itu tidak mendasar. Kelainan pengertian tersebut disebabkan oleh suatu pandangan atau pendekatan (approach) dari masing-masing sarjana terhadap partai politik.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama.

dan orientasi yang sama, dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usaha mendapatkan kekuasaan dan kemudian mengendalikan atau mengontrol jalannya roda pemerintahan yang kesemuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usaha merealisasi atau melaksanakan program-programnya yang telah ditetapkan.

Carl J. Friedrich, memberikan batasan partai politik yaitu :

"Sekelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan pengawasan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasar pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat lokal maupun material."

Dari pendapat diatas dapat dilihat adanya beberapa batasan dalam memahami partai politik yaitu merupakan kumpulan orang yang terorganisir dengan baik, bertujuan merebut pengawasan (kekuasaan) kepada pemerintah, memberikan manfaat yang bersifat lokal maupun material kepada anggotanya.

Sementara itu SOLTU memberikan defenisi partai politik yaitu :

"Sebagai warga Negara yang sedikit banyak terorganisasikan yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat."¹⁴

Pengertian di atas memfokuskan partai politik sebagai suatu kesatuan politik yang bertujuan untuk menguasai pemerintahan guna menjalankan kebijakan yang mereka buat.

SIGMUN NEUMANN dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan defenisinya bahwa :

Partai Politik adalah organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar

¹⁴ Ramlan Surbakti mengutip pendapat Carl J. Friedrich dan Soltu

persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.¹⁵

Pengertian di atas menjelaskan bahwa partai politik sebagai sebuah organisasi politik yang bersaing untuk menguasai pemerintahan dengan jalan merebut dukungan dari rakyat.

Sedangkan batasan partai politik menurut GEORGE B. DE HUSZAR dan THOMAS H. STEVEN adalah :

"Sekelompok orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan."¹⁶

Pendapat diatas memandang partai politik sebagai kelompok orang yang terorganisir yang berusaha menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan-jabatan pemerintahan guna ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan agar dapat merealisasikan program-programnya.

Sementara LAPA LOMPORA dan WINEER memberikan batasan partai politik ialah :

"Organisasi yang mempunyai kegiatan berkesinambungan artinya masa hidupnya tak tergantung masa jabatannya atau masa hidup para pemimpin. Organisasi yang terbuka dan permanen tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat lokal. Para pemimpin di tingkat pusat dan tingkat lokal berkehendak kuat untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan untuk membuat keputusan politik maupun berkoalisi dengan partai lain dan melaksanakan serta mencari dukungan dari para pemilih melalui pemilihan umum atau dengan cara-cara lain untuk mendapatkan dukungan."¹⁷

Lapa Lombara dan Wineer melihat partai politik sebagai organisasi yang mempunyai program yang jelas atau berkesinambungan untuk mencari dan

¹⁵ Mariam Budiarto (ad) *Partisipasi dan Partai Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1987 hal. 14

¹⁶ Soelistyati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987 hal. 112

mengutip pendapat Huszar dan Steven dalam *Political Scienci*

¹⁷ ... dan Wineer melihat partai politik sebagai organisasi yang mempunyai program yang jelas atau berkesinambungan untuk mencari dan

mempertahankan kekuasaan, membuat keputusan politik dengan mencari dukungan dari para pemilih melalui pemilihan umum atau dengan cara-cara lain untuk mendapatkan dukungan.

Dari beberapa batasan-batasan tentang pengertian partai politik yang dikemukakan beberapa pakar dan pengamat politik di atas penyusun menyimpulkan bahwa partai politik adalah suatu organisasi politik yang memiliki basis ideologi dan kepentingan yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional dan melalui dukungan rakyat.

1. b. Tipologi Partai Politik

Pengklasifikasian partai politik berdasarkan kriteria tertentu seperti asas dan orientasi komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan.

Dalam Kriteria dari orientasi partai politik terdapat 3 (tiga) tipe. Adapun ketiga tipe ini meliputi :

Pertama : Partai politik pragmatis yaitu suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tak terikat kaku pada satu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu situasi kepemimpinan akan merubah program, kegiatan dan penampilan partai politik tersebut, penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan cermin dari program-program yang disusun oleh pemimpin utama dan gaya kepemimpinan pemimpin.

Kedua : Partai politik doktriner yaitu suatu partai politik yang mempunyai

dimaksudkan ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkrit dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada taraf tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara kongkrit dan partai ini terorganisasikan secara ketat.

Ketiga : Partai kepentingan, merupakan partai politik yang dibentuk dan dikelola atas kepentingan tertentu seperti : buruh, tani, etnis, agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.¹⁸

ALMOND menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya.¹⁹ Menurut basis sosialnya partai politik dibagi menjadi 4 (empat) tipe yaitu :

Petama : Partai politik yang beranggotakan basis-basis sosial dalam masyarakat seperti kelas atas, menengah dan bawah.

Kedua : Partai politik yang beranggotakan dari kalangan kelompok kepentingan tertentu seperti petani buruh dan pengusaha.

Ketiga : Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik.

Keempat : Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya, seperti suku, bangsa dan daerah tertentu.

Berdasarkan tujuan partai politik dibagi menjadi tiga tipe yaitu :

Pertama : Partai kepentingan kelompok artinya partai yang menciptakan yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.

¹⁸ Gabriel Almond, *Kelompok Kepentingan dan Partai politik*, dalam Moctar Mas'ood dan Collin Mac Andrew (ed.) *Politik dan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press Yogyakarta, hal. 57

Kedua : Partai pembinaan bangsa artinya partai yang mencipkan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.

Ketiga : Partai mobilisasi artinya partai berusaha memobilisasi masyarakat pada suatu tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan kepentingan kelompok cenderung diabaikan, partai ini cenderung bersifat monopolitis karena hanya ada satu partai dalam masyarakat.²⁰

2. c. Fungsi Partai Politik :

Pertama : Sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik dapat membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara terutama sekali di negara-negara yang sedang berkembang, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan negara itu cukup kompleks, maka partai politik dituntut untuk berperan lebih aktif dalam melaksanakan sebagai sarana sosialisasi politik.

Kedua : Partai politik sebagai sarana rekrutment politik. Rekrutment politik melalui proses dimana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang-orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.²¹

Atau biasa dikatakan bahwa rekrutment politik merupakan seleksi atau pemilihan dan pengangkatan seseorang atau kelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.

Ketiga : Partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana komunikasi politik, partai politik sebagai penghubung antara kedua belah pihak, partai politik menyalurkan informasi dari pihak yang satu kepada

²⁰ Haryanto, *Parati Politik Suatu Tinjauan Umum*, LIBERTI, Yogyakarta 1984 hal. 13 dalam Mariam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta 1992. hal. 163-164.

²¹ Mariam Budiarjo (ed) *Partai Politik dan Demokrasi*, PT. Gramedia, Jakarta 1981, hal. 12

pihak yang lainnya secara timbal balik. Arus informasi di suatu negara bersifat dua arah, artinya arus informasi tersebut berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai dalam hal ini adalah sebagai jembatan antara yang memerintah (the rulers) dengan mereka yang diperintah (the ruled).²²

Keempat : Partai politik sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan sebagaimana telah disinggung bahwa partai politik sebagai sarana komunikasi politik, maka sudah menjadi semacam kewajiban bagi partai politik untuk mengatur sedemikian rupa sehingga berbagai ragam pendapat, aspirasi maupun kepentingan yang ada di dalam masyarakat itu dapat disalurkan oleh partai politik kepada penguasa hal tersebut dapat berupa dukungan atau tuntutan.

Proses merumuskan berbagai pendapat / aspirasi maupun kepentingan yang ada kepada penguasa dinamakan artikulasi kepentingan (interest articulation).²³

Sedangkan proses penggabungan tuntutan dan dukungan-dukungan yang ada di dalam masyarakat itu disebut dengan agregasi kepentingan (interest aggregation).²⁴

Kelima : partai politik sebagai sarana partisipasi politik. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan.

Kegiatan yang dimaksud antara lain : mengajukan tuntutan membayar pajak, melaksanakan kebijakan umum, mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, menggunakan alternatif pemimpin dan memilih wakil-wakil rakyat dalam pemilihan umum. Partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan mendorong dan

mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik.

Keenam : Partai politik sebagai pengatur konflik. Konflik yang dimaksud adalah dalam arti luas, mulai dari perbedaan pendapat sampai pada pertikaian fisik antara individu-individu atau kelompok dalam masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak menyampaikan dan memperjuangkan hak dan aspirasinya serta kepentingan sehingga konflik merupakan gejala yang sulit untuk dielakkan.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokratis berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara dialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung berbagai aspirasi dan kepentingan yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik. Apabila partai politik berkeberatan untuk mengadakan kompromi maka partai politik bukannya mengendalikan konflik, melainkan menciptakan konflik dalam masyarakat.

Ketujuh : Partai politik sebagai sarana pembuat kebijakan. Dapat dilaksanakan apabila partai politik yang bersangkutan merupakan partai yang memegang tampuk pemerintahan yang menduduki lembaga perwakilan rakyat secara mayoritas.

Apabila partai tersebut tidak memegang tampuk pemerintahan dan tidak menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas akan tetapi hanya berkedudukan sebagai partai yang melakukan oposisi, maka partai tersebut tidak melakukan fungsinya sebagai sarana pembuat kebijakan tetapi lebih melaksanakan fungsinya sebagai sarana untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana dalam negara yang menganut paham komunis hanya terdapat satu politik saja yaitu

Partai Komunis. Partai Komunis karena hanya satu-satunya saja partai politik di negara tersebut, partai tersebut menjadi partai yang memegang kendali dan mendominasi pemerintahan dan oleh karena itu Partai Komunis dapat dikatakan partai politik yang berfungsi sebagai sarana pembuat kebijakan.

Kedelapan : Partai politik sebagai sarana mengkritik rezim yang sedang berkuasa. Fungsi partai politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang sedang berkuasa pada umumnya berlangsung di negara yang menganut paham demokrasi, karena negara-negara yang menganut paham demokrasi kebebasan untuk mengemukakan pendapat bagi para warga negara termasuk didalamnya menyampaikan kritik pada rezim yang sedang berkuasa, diperbolehkan atau diperkenankan.

Pada umumnya partai politik yang melakukan fungsinya sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang sedang berkuasa biasanya merupakan partai politik minoritas, dengan sendirinya sangat kecil kemungkinannya memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas. Disebabkan karena partai politik tersebut lebih sering mengalami kekalahan daripada memenangkan persaingan dengan partai politik lainnya dalam rangka merebut dan mendapatkan sebanyak-banyaknya dukungan dari warga negara, yang mana banyak atau sedikitnya dukungan dari warga negara akan menentukan kekuasaan yang diperolehnya.

Pada hakekatnya berbagai kritik yang dilancarkan partai minoritas / partai oposisi dimaksudkan untuk mengontrol roda pemerintahan yang dikendalikan oleh rezim yang sedang berkuasa. Dengan adanya berbagai macam kritik, apalagi kritik tersebut dilancarkan terus-menerus dan ketat, paling tidak akan memaksa rezim yang sedang berkuasa untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan dan tidak bertindak

secara sewenang-wenang. Tanpa adanya kritik yang mengontrol rezim yang sedang berkuasa akan bertindak sewenang-wenang dan cenderung akan menggunakan kekuasaan yang ada pada dirinya.

Namun demikian fungsi partai-partai demokratis tersebut tidak selalu ditemukan dinegara-negara yang masih baru atau non demokratis. Memang partai juga memainkan fungsi-fungsi di atas, tetapi tidak berjalan secara kompetitif dan semuanya dibawah kontrol negara. Dinegara-negara baru misalnya : kebangkitan dan aktifitas partai politik kerap kali berkaitan dengan proses pembentukan identitas nasional. Diantara kaitan ini partai politik kerap kali tidak berfungsi sebagai penyedia akses bagi penyaluran, tuntutan yang absah pada penguasa, tetapi sebagai elemen dalam strategi persatuan nasional dan pengontrol perbedaan pendapat.²⁵

Sebaliknya, partai-partai didalam negara yang non demokratis biasanya memerankan fungsinya sebagai alat untuk memobilisasi massa, mencari legitimasi di mata rakyatnya untuk mendukung sistem politik, untuk melestarikan status quo dan sebagainya. Dalam batas-batas tertentu partai politik non demokratis juga menjalankan fungsinya sebagaimana partai demokratis, namun hal tersebut tidak berjalan secara kompetitif. Di dalam sistem multipartai, fungsi-fungsi partai tersebut lebih didominasi oleh partai negara. Sementara partai-partai lainnya hanya sebagai penonton saja, kurang memainkan perannya, layaknya partai politik.

Kondisi didalam negara yang menganut sistem partai seperti negara-negara komunis, jauh lebih para lagi. Di negara komunis peran partai sangat sentral, sehingga wacana tentang partai terasa lebih penting ketimbang diskusi tentang negara, dalam

²⁵ Jelasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989, hal. 11

kenyataannya, keterkaitan komunis dalam banyak hal mendorong hampir seluruh fungsi dalam sistem politik, baik input ataupun output, akibatnya partai adalah penjaga kelangsungan sistem, dan pada saat yang lain muncul sebagai negara itu sendiri.²⁶

Dengan demikian peran dan fungsi partai politik sangat mulia bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Meskipun partai tersebut mempunyai kepentingan sendiri-sendiri tetapi keberadaannya dan kebenaran mereka membutuhkan dukungan rakyat sebagai penyalur suara rakyat. Partai akan memainkan peran membentuk wakil-wakil rakyat yang duduk di dewan perwakilan rakyat maupun pemerintah.

2. Pola Kaderisasi

Kebutuhan kader yang tentunya setiap kader politik mempunyai kaderisasi dalam rangka membentuk atau mempersiapkan tenaga-tenaga potensial, militan, terdidik, terlatih untuk mengarahkan dan menggerakkan berbagai kekuatan atau sumber daya serta mampu memimpin dan melaksanakan tugas pencapaian misi daripada organisasi secara maksimal.

Kebutuhan kader dapat diidentifikasi dari jenis kegiatan yang secara spesifik menjadi kebutuhan internal partai politik. Bambang Yudhoyono memberikan gambaran identifikasi tersebut :

- a. **Kader Pemimpin Partai** : adalah mereka yang dipersiapkan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan dimasa yang akan datang. Meskipun semua anggota partai yang berkualifikasi kader mempunyai kesempatan yang sama, namun harus dipastikan kader yang akan menduduki jabatan pimpinan partai adalah yang berkualitas dan

- b. **Kader Penggerak Partai** : adalah mereka yang dipersiapkan untuk mengemban tugas menggerakkan kegiatan-kegiatan partai.
- c. **Kader Konseptor Partai** : adalah mereka yang dipersiapkan untuk mengemban tugas sebagai pemikir atau ideologi partai.
- d. **Kader Intelejen Partai** : adalah mereka yang secara khusus dipersiapkan dalam rangka tugas-tugas intelejen dalam kepentingan tertentu.
- e. **Kader Fungsional** : adalah mereka yang secara khusus dipersiapkan untuk mengemban tugas dalam jabatan-jabatan strategis di lembaga taktis eksternal tetapi dibawah kendali partai.

Kebutuhan kader-kader politik yang berkualitas seperti di atas, didasarkan pada asumsi adanya komitmen yang kuat untuk benar-benar mewujudkan kehidupan yang demokratis pada partai politik.

Identifikasi terhadap kabutuhan kader ini maka dibutuhkan kaderisasi. Dalam menggambarkan proses kaderisasi maka kita harus mengenali istilah kader dan kaderisasi. Istilah kader berasal dari bahasa Inggris yaitu Cadre, yaitu sebutan yang diberikan kepada seseorang yang karena berbagai kelebihan atau potensi yang dimiliki dipandang mampu sebagai kandidat untuk memegang jabatan penting atau strategis dimasa-masa mendatang.²⁷

Adapun pengertian lain dari istilah ini adalah sebagai berikut :

- 6. Menurut **B. N. Marbun** : Kader adalah orang yang diharapkan akan memegang pekerjaan penting di pemerintahan, partai, organisasi dan sebagainya.²⁸

6. **Nur Kahlif Hazim** : Kader adalah tenaga gembengan, tenaga yang telah dilatih sedemikian rupa sehingga mahir dalam seluk beluk sesuatu.²⁹
6. **M. Dahlan Al Barry** : Kader adalah orang atau seseorang yang dididik dan dilatih untuk menjadi penerus estafet sesuatu partai atau organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat ditarik beberapa butir penting dari pengertian kader yaitu :

1. Merupakan orang terpilih yang berkualitas.
2. merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi kepemimpinan atau pekerjaan penting di pemerintahan atau organisasi.
3. seseorang yang dipersiapkan sebagai penerus atau estafet organisasi.
4. merupakan hasil gembengan sehingga mahir dalam seluk beluk sesuatu organisasi.

Dari beberapa pengertian dan butir penting di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kader adalah orang yang terpilih dan berkualitas yang dipersiapkan sebagai penerus organisasi untuk memegang jabatan-jabatan penting.

Dari batasan di atas dapat dipahami bahwa seorang kader politik pasti merupakan anggota dari partai politik, tetapi seorang anggota partai politik belum tentu sebagai kader. Kader diperoleh melalui proses kaderisasi yang mengandung makna menurut Sumitro Maskun bahwa :

“Kaderisasi adalah suatu proses membentuk dan mempersiapkan tenaga-tenaga potensial, militan, terdidik., terlatih untuk mengarahkan dan menggerakkan berbagai kekuatan atau sumber daya serta mampu memimpin dan melaksanakan tugas-tugas pencapaian misi organisasi secara optimal dimanapun berada dengan penuh dedikasi, semangat dan tanggap terhadap situasi yang ada”.³⁰

Dari pendapat di atas dapat dilihat adanya beberapa proses kaderisasi yaitu mencetak tenaga terlatih dan terdidik, yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan responsif terhadap situasi. Ketiga hal ini yang harus dimiliki oleh elit-elit sebagai kader organisasi dalam menjalankan kesinambungan organisasi partai.

Menurut M. Dahlan Al Barry bahwa :

“Kaderisasi adalah digunakan dalam pengertian yang seluas mungkin untuk menunjukkan latihan (training) dan persiapan untuk kepemimpinan proses ini. Proses ini lebih terbuka masyarakat, menampilkan badan legislatif atau pemerintah serta fungsi-fungsi lain dari anggota partai dan tentunya saja kompetisi yang baik adalah melalui pemilihan dari partai menyediakan kontestan-kontestan politik tersebut”.³¹

Pengertian diatas lebih menitik beratkan pada proses pembentukan *leadership* atau *leadership training* yang terbuka bagi anggota partai sebagai kontestan politik.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kaderisasi merupakan suatu proses yang menunjukkan training dalam mempersiapkan tenaga-tenaga potensial yang terdidik dan terlatih untuk mengarahkan dan menggerakkan berbagai kekuatan atau sumber daya serta mampu memimpin dan melaksanakan tugas pencapaian misi daripada organisasi secara optimal, serta menjadi kontestan pemimpin.

Kebutuhan partai terhadap kaderisasi adalah untuk melahirkan kader-kader baik formal maupun informal yang masing-masing mempunyai kualifikasi sendiri. Adapun dua bentuk kaderisasi :

Kaderisasi formal membentuk kader melalui upaya-upaya yang secara sengaja, berpola dan berkala.

Kaderisasi informal membentuk kader secara perorangan tanpa pola dan tidak dibatasi oleh waktu.

³¹ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Astoto, Surabaya 1994

Dari batasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kaderisasi adalah suatu tatanan atau keteraturan proses untuk membentuk dan mempersiapkan potensi dari orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi sumber daya yang mampu memimpin dan melaksanakan tugas-tugas pencapaian misi organisasi melalui pelatihan atau pendidikan.

Penyiapan kader-kader politik menyangkut beberapa aspek penting yang harus diperhatikan baik internal maupun eksternal partai yang harus dikendalikan oleh partai politik agar terpatni menjadi kemampuan yang utuh pada setiap kader.

1. Aspek Ideologi

Membentuk dan menyiapkan kader politik adalah dalam arti mengejawantakan ideologi dan dasar negara dalam pemikiran pragmatis dan operasional sebagai bentuk pengalaman. Aspek ini perlu memperoleh penekanan, karena fenomena yang tampak kader partai tidak menampilkan pemikiran-pemikiran dan sikap perilaku yang ideologis.

2. Aspek Idialistik

Bahwa pembentukan dan penyiapan kader politik merupakan upaya yang diharapkan dapat menghasilkan pejuang dan pemikir yang dapat menciptakan pembaharuan dan perubahan serta dapat memandang jauh ke depan tentan g potensi rakyat, bangsa dan tanah airnya untuk didayagunakan bagi kesejahteraan, kemakmuran dan kekayaan bersama.

3. Aspek Intelektual

Dalam arti bahwa pembentukan dan penyiapan kader politik mengarah juga pada pembentukan militansi yang memiliki kemampuan intelektual yang dimanifestasikan

dalam pemikiran sikap dan perilaku daya intelegensi yang tinggi, daya pengamatan analitis dan pertanggungjawaban pendapat.

4. Aspek Organisatoris

Bahwa pembentukan dan penyiapan kader politik didasarkan orientasi visi, misi dan tujuan partai yang diselaraskan dengan visi dan misi daerahnya.

5. Aspek Operasional

Bahwa pembentukan dan penyiapan kader politik dilakukan dengan melibatkan dalam kegiatan operasional melalui tahapan level paling bawah ke level tertinggi yang mungkin dijangkau, agar benar-benar dapat menghayati persoalan-persoalan di lapangan. Kader seperti ini akan berciri bukan kader karbitan, melainkan nyata tumbuh dari bawah.

Partai politik sebagai organisasi yang berkorelasi dengan kekuatan negara, dituntut kemampuannya untuk melakukan proses seleksi berdasarkan pengujian, penilaian dan pertimbangan tertentu. Hasil dari pengamatan terhadap keaktifan, keterampilan, kepandaian, moral dan moralitas, dedikasi dan sebagainya untuk membedakan secara prinsipil antara mereka yang berkualifikasi “kader” dengan “anggota” untuk menghasilkan kader-kader militan yang sanggup mengemban visi dan misi organisasi secara optimal sehingga tentunya akan ada tahapan-tahapan proses pengkaderan serta rekrutmen melalui kriteria tertentu untuk mendukung tingkat kualitas dan obyektifitas kader.

Untuk mempersiapkan kader-kader yang berkualitas, ada beberapa tahapan yang harus ditempuh dalam kaderisasi. Hal ini digambarkan oleh Bambang Yudhoyono dalam

- a. Perekrutan kader, merupakan tahap awal kaderisasi dalam penentuan calon-calon kader melalui seleksi untuk dididik dan dilatih.
- b. Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan tingkat dasar yaitu upaya dasar pembekalan pemikiran ideologi, metode berfikir menurut aliran atau isme tertentu, pengenalan kesisteman, studi kasus dalam rangka penyamaan pola pikir dan cara pandang serta peningkatan pengetahuan.
- c. Penugasan, untuk mengukur seberapa jauh potensi seorang kader dapat berkembang menuju praktis operasional.
- d. Kursus kader tingkat lanjutan yaitu proses peningkatan kualitas kader setelah yang bersangkutan menjalani proses penugasan.
- e. Kepeloporan yaitu suatu upaya menempatkan para kader pada posisi peranan sesuai dengan kualifikasi kemampuannya dalam berorganisasi.
- f. Pematangan dan pendewasaan melalui berbagai media ilmiah untuk menambah wawasan, tingkat kritis dan reaktif analitif.

Semua proses ini akan menjadi sesuatu yang penting bagi partai politik dalam rangka peningkatan kualitas kader-kader partai. Partai Golkar sebagai unit analisis penelitian, maka penyusun mencoba untuk menggambarkan kaderisasi di tubuh partai Golkar.

4. Kaderisasi Partai Golkar

Kaderisasi dalam partai golkar merupakan aktivitas utama partai, untuk itu partai golkar juga sering disebut partai kader, tentunya tidak begitu menekankan pada jumlah massa yang besar tetapi lebih menekankan pada disiplin anggota-anggotanya dan ketaatan dalam organisasi. Sehingga kekuatan partai kader sesungguhnya bersumber bukan dari

Ada beberapa jenis perkaderan dalam partai Golkar yaitu :

1. Perkaderan umum adalah bersifat umum dan fungsional untuk meningkatkan kemampuan manajerial, kepemimpinan tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.
2. Perkaderan khusus adalah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknis, profesi/ keterampilan untuk tugas-tugas khusus.
3. Perkaderan territorial desa/ kelurahan adalah bersifat sementara bagi calon anggota untuk memperluas basis massa.

Adapun tujuan dari proses kaderisasi tersebut antara lain :

1. Menanamkan pemahaman dan loyalitas yang tinggi kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan eksistensi partai.
2. Menyamakan pemahaman, penghayatan dalam melaksanakan visi, misi dan tujuan partai.
3. Meningkatkan disiplin, militansi, keteguhan, dedikasi, motivasi, pengabdian, tanggungjawab atas perjuangan partai.
4. Menyamakan pola pikir dan sikap serta melatih bertindak strategis dan praktis dalam menyelesaikan tugas/ masalah, menghadapi tantangan, serta mengoptimalkan peluang yang ada.
5. Optimalisasi peran kepemimpinan, melakukan interaksi social, serta tanggap terhadap perkembangan lingkungan.
6. Melakukan komunikasi politik serta mengaktualisasikan budaya politik yang

7. Menumbuhkan keterbukaan terhadap kemajuan berorientasi ke masa depan tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang baik, dan mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik.
8. Mengembangkan kemampuan analisis secara cepat dan tepat, mampu mengantisipasi serta memecahkan persoalan-persoalan.
9. Meningkatkan daya adaptasi yang tinggi serta visi ke depan dalam mensikapi berbagai perkembangan keadaan, menyerap aspirasi dan keinginan masyarakat.
10. Menjadi motivator dalam pemberdayaan masyarakat sesuai profesi dan pekerjaan masing-masing.

Adapun pendayagunaan yang bersifat internal maupun eksternal yaitu :

- 6 Pendayagunaan internal yaitu memberikan kesempatan, peluang, dan posisi pada kader yang potensial untuk mengembangkan diri dalam kelembagaan partai (Dewan Pimpinan Partai, Lembaga/ Badan, Sayap dan atau pokja).
- 6 Pendayagunaan eksternal yaitu kebijakan untuk memberikan kesempatan mengembangkan penugasan kader diluar kelembagaan partai : Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Ormas, Profesi, LSM, dunia usaha serta Akademisi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa semua proses kaderisasi yang dikemukakan diatas untuk menyiapkan dan membentuk kader partai yang profesional dan handal yang mampu melaksanakan tugas organisasi dan pembangunan bagi terwujudnya

E. DEFENISI KONSEPSIONAL

Konsep merupakan generalisasi dari seluruh fenomena tertentu sehingga dapat dipahami dan dimengerti, tidak terjadi kesalahpahaman arti dari masing-masing variabel.

Defenisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1. **Partai Politik** adalah suatu organisasi politik yang memiliki basis ideologi dan kepentingan yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional dan melalui dukungan massa rakyat.
2. **Kader** adalah orang yang terpilih dan berkualitas yang dipersiapkan sebagai penerus organisasi serta untuk memegang jabatan-jabatan penting.
3. **Kaderisasi** adalah suatu proses yang menunjukkan persiapan tenaga-tenaga potensial yang terdidik dan terlatih untuk mengarahkan dan menggerakkan berbagai kekuatan atau sumber daya serta mampu memimpin dan melaksanakan tugas pencapaian misi daripada organisasi secara optimal, serta menjadi kontestan pemimpin.

F. DEFENISI OPERASIONAL

Defenisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel-variabel. Sedangkan variabel adalah suatu karakteristik yang mempunyai variasi nilai/score/ukuran.³²

Pada bagian defenisi operasional ini secara singkat dapat dijelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat kaderisasi dalam Partai yaitu :

³² M. S. Sinambing dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian IPS*, Jakarta 1987, hal. 46

1. Perekrutan Kader, yang digunakan dan merupakan tahap awal kaderisasi dalam penentuan calon-calon kader melalui seleksi untuk dididik dan dilatih.
2. Penyelenggaraan Pelatihan dan Pendidikan Tingkat Dasar (*basic training*), yang merupakan upaya dasar pembekalan pemikiran ideologi, metode berfikir menurut aliran/isme tertentu, pengenalan kesisteman, studi kasus dalam penyamaan pola piker dan cara pandang serta peningkatan pengetahuan.
3. Penugasan (*assignment*), untuk mengukur seberapa jauh potensi seorang kader berkembang menuju praktis operasional.
4. Kepeloporan (*avangarde*), suatu upaya untuk menempatkan seorang kader pada posisi peranan sesuai dengan kualifikasi kemampuannya dalam berorganisasi.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif yang menurut JACOB VREDEN BURG dalam Hadar Nawawi,³³ diartikan sebagai :

Langkah-langkah melakukan reinterpretasi obyektif tentang fenomena sosial yang terdapat pada objek yang diteliti. Sedangkan Mohammad Nasir mendefenisikan penelitian diskriptif adalah sebagai berikut :

“Suatu studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat, melukiskan secara akurat sifat-sifat dan beberapa fenomena kelompok atau individu menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan bias dan memaksimalkan reliabilitas. Analisis dikerjakan berdasarkan data expos fakta artinya data dikumpulkan setelah kejadian berlangsung”.

Metode diskriptif memiliki berbagai bentuk, namun dalam sifat tertentu yang umumnya terdapat didalamnya sehingga dipandang sesuai dengan ciri khasnya. Ciri-ciri khas utama yang dimaksud adalah :

- a. Memuaskan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang.
- b. Data yang dikumpulkan pertama kali disusun, dijelaskan kemudian dianalisis karena itu metode analisis sering disebut metode analisa.³⁴

Adapun tujuan penelitian diskriptif adalah :

“untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala kelompok tertentu atau untuk menemukan penyebaran (frekuensi) suatu gejala atau lainnya dalam masyarakat”.

Sedangkan menurut Singarimbun, penelitian diskriptif bisa dilakukan tanpa hipotesis yang dirumuskan secara ketat, ia juga mengenal hipotesis tetapi tidak diuji secara statistik selain itu juga mempunyai dua tujuan yaitu :

- a. Mengetahui perkembangan secara fisik tertentu frekuensi terjadinya aspek suatu fenomena sosial.
- b. Untuk mendiskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.³⁵

Penelitian ini juga dilengkapi dengan metode survey khususnya survey kelembagaan.³⁶ Mengingat studi ini mengambil unit of analisisnya sebuah lembaga politik yaitu DPD I Partai Golongan Karya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui survey ini diharapkan menemukan data yang dapat digunakan sebagai dasar

³⁴ Winarso Surahmad, *Dasar-Dasar Teknik Research*, Pengantar, Metodologi Ilmiah, Tristo Bandung, 1989. hal. 132.

³⁵ Mersi Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, I P3S, Jakarta, 1987, hal. 4.

untuk menganalisa dari lembaga yang diselidiki dalam konteks studi ini adalah yaitu :
Partai Golongan Karya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian tentang Kaderisasi Partai Golongan Karya Dalam Menyongsong Pemilu 2009. berusaha mengungkapkan dan menjelaskan segala aspek yang berkaitan dengan kaderisasi Partai Golongan Karya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dilatarbelakangi pemikiran rasional dan menekankan pada obyektifitas.

Sedangkan tujuan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif lebih menitikberatkan dalam memahami dan menjelaskan situasi kondisi tertentu, bahkan hanya menemui sebab akibat dari fenomena yang diteliti. Untuk sampai pada suatu kesimpulan obyektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos segalanya dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.³⁷

Karena tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan pola kaderisasi dalam Partai Golongan Karya dalam menyongsong pemilu 2009, maka yang digunakan adalah metode diskriptif yang menurut Suryadi Subrata yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan tentang situasi-situasi atau kejadian-kejadian populasi atau kelompok tertentu.³⁸

Dengan menggunakan metode penelitian di atas maka diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan gambaran yang jelas tentang kaderisasi dalam Partai Golongan Karya.

Sedangkan tindakan penelitian ini tidak menggunakan jenis penelitian kuantitatif yaitu tidak menggunakan data-data statistik.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Karya Bandung. 1994.

³⁸ Suryadi Subrata, *Metode Penelitian*. Jakarta: Pajawali Pama. Hal. 10.

2. Unit Analisis

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (empirik) maka unit analisisnya yaitu :

Semua pengurus dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya yaitu meliputi Ketua DPD, Sekretaris, Bendahara dan juga diambil dari kader-kader dan pengurus harian DPD Partai Golongan Karya.

3. Teknik Penentuan Informan

Teknik pengambilan informan dipilih SNOW BALL SYSTEM, yaitu mengambil satu informan yang kemudian melebar ke informan lainnya sehingga terkumpul sebanyak mungkin responden. Adapun yang dimaksud adalah :

“Pengurus di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya yang meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya serta diambil dari para Kader dan Simpatisan Partai Golongan Karya”.

4. Data Yang Diperlukan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- Data primer adalah : data autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan.³⁹

Melihat dari uraian tersebut maka data primer meliputi dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Partai Golongan Karya. Termasuk data primer ini adalah data yang bersumber dari orang-orang yang menjadi pengurus Partai Golongan Karya, dalam hal ini adalah di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Daerah

- Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah : data yang dikutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.⁴⁰ Yang antara lain berupa Arsip-arsip atau dokumen-dokumen atau berita di surat kabar/majalah yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka teknik yang digunakan adalah :

a. Observasi yaitu :

Mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Hal-hal yang diamati berhubungan dengan kaderisasi dalam Partai Golongan Karya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara yaitu :

Pengumpulan data selain menggunakan metode observasi, data juga dapat diperoleh dengan menggunakan metode interview atau wawancara.

Dalam hal ini informasi keterangan diperoleh langsung dari responden atau informasi dengan tanya jawab secara langsung baik tertulis maupun lisan.

Menurut Hadar Nawawi interview adalah :

“usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan saja”.⁴¹

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa interview adalah suatu cara untuk mendapatkan data dengan cara bertanya langsung dengan responden. Kemudian menurut Sutrisno Hadi menyatakan bahwa interview adalah :

Interview sebagai proses tanya jawab lisan, dimana terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan hadapan secara fisik yang satu dapat melihat, maka secara fisik

yang satu dapat melihat muka yang lain mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan informasi yang langsung tentang beberapa jenis data sosial, baik yang terpendam maupun yang tidak.

Dari pengertian di atas nampak jelas bahwa interview adalah suatu usaha untuk mendapatkan informasi dari responden dengan cara bertatap muka langsung dengan respondennya sehingga dapat melihat, mendengar apa yang dikatakan oleh responden tersebut. Misalnya data yang bersifat sosial atau data-data yang terpendam atau tidak terpendam.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan interview adalah suatu cara untuk mendapatkan suatu informasi, data sosial, data-data yang terpendam dan tidak terpendam dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, sehingga dapat melihat dan mendengarkan suara yang sedang ditanya. Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan :

- Pengurus DPD I Partai Golkar propinsi daerah istimewa yogyakarta.
- Kader-kader dan simpatisan DPD I Partai Golkar propinsi daerah istimewa yogyakarta serta Dokumentasi atau yang sering disebut studi pustaka, yaitu : Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penyelidikan.⁴²

Dokumentasi ini diambil dari arsip-arsip mengenai Partai Golongan Karya yang ada di Kantor DPD I Partai Golkar propinsi daerah istimewa yogyakarta dan juga

lempar atau majalah yang memuat tentang Partai tersebut

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus dengan berdasarkan pada data yang dihimpun secara faktual, sistematis dan cermat, pada dasarnya penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergambung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang yang lain dalam bahasanya dan keistilahannya. Dalam analisis data kualitatif, akan mengeneralisasikan fenomena metode non statistik, yaitu analisis deskriptif yang artinya data yang diperoleh dalam penelitian nantinya dilaporkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran mengenai fakta yang ada.

Dalam analisis ini data diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induksi yaitu proses mengorganisasikan fakta - fakta atau hasil - hasil pengamatan yang terpisah – pisah menjadi suatu rangkaian hubungan yang terkait atau relevan dengan penelitian ini. Dalam perkembangan suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan studi kasus, dimana sumber yang diperoleh akan menghasilkan informasi kualitatif